

KAPASITAS INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA ALAM GUNUNG PINANG KABUPATEN SERANG

¹Rethorika Berthanila, ²Budi Hasanah, ³Ahmad Sururi

¹²³Universitas Serang Raya

e-mail : ¹rethorikaberthanila@gmail.com · ²budihasanahrocket@gmail.com

³ahmadbroer@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kapasitas inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang di Kabupaten Serang. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang Kabupaten Serang seperti lemahnya *political will* dan komitmen dari stakeholder, lemahnya kolaborasi sebagai pendorong kapasitas inovasi, inovasi masih bersifat *top down*, rendahnya dukungan politik dan anggaran dan masih minimnya jaringan pendukung inovasi dapat diatasi melalui pendekatan kapasitas inovasi pemerintah daerah yaitu kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi dan kapasitas jaringan pendukung inovasi.

Kata Kunci: kapasitas inovasi, pemerintah daerah, kawasan wisata alam gunung pinang.

CAPACITY INNOVATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN MANAGING NATURAL TOURISM AREA GUNUNG PINANG, SERANG DISTRICT

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the capacity of local government innovation in the management of Gunung Pinang natural tourism area in Serang Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Various problems in the management of the natural tourism area of Gunung Pinang, Serang Regency such as weak political will and commitment from stakeholders, weak collaboration as driving capacity for innovation, innovation is still top-down, low political and budget support and the lack of innovative support networks can be overcome through the innovation capacity approach local government namely the leadership innovation capacity, the capacity of implementing quality innovation, the capacity of the innovation structure and the capacity of the innovation support network.

Keywords: innovation capacity, local government, Gunung Pinang natural tourism area.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik sesuai dengan pilihan dan aspirasi publik. Peran pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki tersebut akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dapat memberikan dampak bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mendorong sebuah kondisi untuk mencari strategi yang efektif melalui kebijakan dan program-program yang inovatif.

Beberapa alasan mengapa pemerintahan daerah memiliki beberapa alasan untuk mengembangkan kemampuan inovasi adalah dikarenakan unit organisasi pemerintahan daerah sangat dekat dengan masyarakatnya, sehingga dianggap mengetahui secara pasti masalah-masalah pada aras lokal. Demikian halnya masalah yang dihadapi masyarakat sudah barang tentu berbeda sehingga harus pula ditangani dengan cara yang berbeda pula. Watson (1999:130).

Pemerintah daerah dalam berbagai aspek harus dapat menjawab dinamika dan tuntutan masyarakat sehingga pengembangan kapasitas harus terus dilakukan. Kapasitas menyangkut tiga dimensi yakni (1)dimensi sumberdaya manusia (*human resource*); (2)dimensi organisasi (*organizational strengthening*); dan (3)dimensi reformasi kelembagaan (*institutional reform*). Pada setiap dimensi kapasitas tersebut memiliki fokus penekanan tertentu dan jenis-jenis usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan setiap fokus pada masing-masing dimensi kapasitas (Grindle, 1997:9). Sedangkan Eade (1998) dalam Keban (2000:9) merumuskan bahwa kapasitas itu memiliki tiga dimensi, yaitu: (1)individu; (2)organisasi; dan (3)jaringan (*networking*).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang inovasi dan pariwisata sudah dilakukan seperti oleh (Lecture, Costa, & Lecture, 2011; Brandao, Filipa, 2015; Hjalager, 2010; Alsos, Eide, & Madsen, 2014)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Peters & Pikkemaat, 2006) membahas tentang kemampuan pemerintah dalam merespon permasalahan merupakan isu strategis dan penting untuk menjamin pertumbuhan dan

keberlanjutan dunia industri pariwisata. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Lopes & Kastenholz, 2014) menyoroti tentang peran yang dimainkan oleh jejaring sosial sebagai sumber pengetahuan, dan menjadi dasar penting untuk inovasi bisnis pariwisata. Dan hasil penelitian (Zach & Hill, 2017) menunjukkan bahwa jaringan, pengetahuan dampak hubungan dengan stakeholder memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pariwisata.

Kapasitas inovasi kebijakan pemerintah daerah dapat dipandang sebagai inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat (Sururi, 2016) Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh (Gomezelj, 2015) yang mengintegrasikan model dan dampak karakteristik kewirausahaan, jaringan, pengembangan teknologi dan lingkungan menjadi faktor sukses inovasi sekaligus menjadi titik awal pengembangan pariwisata.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sururi, 2018) tentang model inovasi kebijakan pariwisata melalui sinergitas antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Diperlukan batas-batas kewenangan dan intervensi yang jelas antara pemerintah selaku regulator dan supervisor, swasta selaku fasilitator dan masyarakat/publik selaku operator. Meskipun hambatan terkait organisasi, lingkungan dan proses-inovasi inovasi di sektor pariwisata tampaknya saling terkait erat dan muncul atau cenderung terjadi pada saat rencana awal antar pemangku kepentingan bisnis wisata lokal (Najdajanoszka & Kopera, 2014).

Kemudian Rogers (2003:12) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu (satu unit) tertentu dan diadopsi oleh yang lainnya. Osborne dan Brown (2005:127) mengemukakan bahwa inovasi memiliki beberapa atribut sebagai berikut: (1)*Relative Advantage* atau keuntungan relatif, bermakna bahwa sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai-nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lain atau inovasi sebelumnya. (2)*Compatibility* atau kesesuaian,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

bermakna bahwa inovasi sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau berkesesuaian dengan inovasi yang digantinya dan lingkungan dimana inovasi diterapkan. (3)*Complexity* atau kerumitan, artinya dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. (4)*Triability* atau kemungkinan dicoba, artinya inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. (5)*Observability* atau kemudahan diamati, artinya bahwa sebuah inovasi harus dapat diamati, terutama pada sisi bagaimana sebuah inovasi beroperasi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dalam konteks kapasitas inovasi sektor publik, termasuk sektor pemerintahan daerah, menurut Gabries, *et al* (2009: 23-24), bahwa dalam mengelola inovasi sangat ditentukan oleh tiga kunci faktor strategis (*three core strategic factors*) yaitu **Pertama**, pemimpin yang kredibel (*leadership credibility*). Pemimpin yang memiliki kredibilitas adalah pemimpin yang memiliki keterampilan dan perilaku yang dapat dipelajari, dipraktekkan dan digunakan untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi; **Kedua**, faktor adanya tim manajemen yang kuat (*strong management teams*). Tim manajemen yang kuat dalam konteks ini adalah struktur birokrasi pemerintah daerah yang profesional, yang bekerja menurut fungsi dan tugas masing-masing unit; **Ketiga**, adalah berfungsinya badan-badan pemerintahan (*governing board functioning*). Dalam konteks ini yang dimaksud adalah bekerjanya lembaga perwakilan warga (*council city*) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, seperti rencana strategi pembangunan, kebijakan tentang pengalokasian anggaran dan menyusun solusisolusi atas persoalan masyarakat tanpa membeda-bedakan (diskriminasi).

Kemudian Kim, *et al* (2007:33). Dalam studinya mengenai kapasitas inovasi pemerintahan merumuskan suatu model yang disebut model kapasitas manajemen dan inovasi pemerintahan (*a model of management capacity and government innovation*). Model kapasitas manajemen inovasi pemerintahan ini terdiri dari empat dimensi yang membangun kapasitas manajemen pemerintahan dalam berinovasi. Keempat dimensi dari model kapasitas manajemen inovasi pemerintahan meliputi; (1)kepemimpinan inovatif (*innovative*

leadership), yakni tersedianya kepemimpinan yang memiliki kemampuan inovasi dan memiliki komitmen untuk menjaga dan menyebarkan inovasi tersebut; (2)kualitas tim kerja (*quality of workforce*), yakni kualitas aparatur (pegawai pemerintah) yang mempunyai kompetensi dan skil sehingga bisa profesional dalam bekerja; (3)sistem/struktur (*systems/stuctures*), yaitu tersedianya sistem organisasi dan struktur organisasi yang mendukung program inovasi; dan (4)pengelolaan pengaruh dari luar (*managing external influences*).

Kebijakan pengelolaan Kawasan Wisata Alam Gunung Pinang di Kabupaten Serang merupakan salah satu kebijakan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibidang pariwisata dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti masyarakat dan swasta. Komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat haruslah terlibat dalam pengelolaan tempat wisata dari mulai perencanaan karena masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dalam pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan atau pengelolaan.

Secara empiris kapasitas inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang dilakukan melalui pelibatan stakeholder yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LPMD) selaku pengelola hutan dengan melibatkan dua desa yang secara geografis berdekatan dengan kawasan Gunung Pinang dan memiliki kewenangan yaitu Desa Toyomerto dan Desa Pejaten, pihak swasta selaku penyedia wahana wisata dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Banten. Meskipun demikian, kapasitas inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata gunung pinang masih mengalami hambatan dan permasalahan seperti lemahnya *political will* dan komitmen dari stakeholder, lemahnya kolaborasi sebagai pendorong kapasitas

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

inovasi, inovasi masih bersifat *top down*, rendahnya dukungan politik dan anggaran dan masih minimnya jaringan pendukung inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapasitas inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang di Kabupaten Serang.

B. PEMBAHASAN

Deskripsi pembahasan tentang kapasitas inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang di Kabupaten Serang akan diuraikan melalui beberapa sub pokok pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas Inovasi Kepemimpinan

Kapasitas kepemimpinan inovatif (*innovative leadership capacity*) berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mendorong pengembangan inovasi dalam suatu organisasi tertentu. Seorang pemimpin yang memiliki kapasitas inovasi adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan dan berwawasan yang luas dalam hal pengembangan inovasi, komitmen yang tinggi dan kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam konteks penelitian ini, penggambaran kapasitas kepemimpinan inovatif hanya fokus pada kapasitas kepemimpinan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banten dalam mendorong pengembangan inovasi pada pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, kapasitas inovasi kepemimpinan sudah berjalan melalui berbagai program-program pengembangan pariwisata seperti membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah dilaksanakan seperti penandatanganan kerjasama kemitraan dengan masyarakat setempat, kegiatan forum group diskusi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang. Meskipun demikian gagasan inovasi masih bersifat *topdown* dan tergantung kepada pemimpin sehingga efektifitas inovasi belum berjalan secara optimal.

2. Kapasitas Inovasi Pelaksana Yang Berkualitas

Ketersediaan tenaga pelaksana atau sumber daya manusia berkualitas dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang sangat

penting dalam mendukung pencapaian program pengembangan pariwisata. Fakta penelitian secara empiris mendeskripsikan tenaga pelaksana sebagian besar dari masyarakat dua desa yang secara geografis berdekatan dengan kawasan gunung pinang yaitu Desa Pejaten dan Desa Toyomerto yang memiliki keterbatasan dalam bidang pariwisata.

Kondisi demikian menyebabkan kapasitas inovasi pelaksana masih belum optimal sehingga berdampak capaian program hanya bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, hal tersebut disebabkan juga dikarenakan perencanaan program inovasi yang belum dilakukan secara komprehensif.

3. Kapasitas Struktur Inovasi

Yaitu tersedianya sistem organisasi dan struktur organisasi yang mendukung program inovasi. Kapasitas struktur inovasi dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang didukung oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dikelola oleh masyarakat Desa Toyomerto dan Desa Pejaten.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, struktur pengelola belum mendapatkan dukungan politik dan anggaran. Hal tersebut menyebabkan masih rendahnya optimalisasi pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang. Minimnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Serang mengakibatkan pengembangan wahana pariwisata menjadi terhambat.

Permasalahan rendahnya dukungan politik dan anggaran dapat diatasi melalui mekanisme politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan dialog dan komunikasi secara intensif untuk mensosialisasikan program-program kerja pengembangan wisata alam gunung pinang.

4. Kapasitas Jaringan Pendukung Inovasi

Kemampuan pemerintah dalam membangun jaringan dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan inovasi pengelolaan wisata alam gunung pinang. Jaringan yang dibangun baik dari eksternal dan internal. Dengan demikian permasalahan lemahnya kolaborasi sebagai pendorong kapasitas inovasi dapat diatasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian secara empiris dapat dikemukakan bahwa jaringan pendukung inovasi pengelolaan wisata

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

alam gunung pinang masih minim dan terbatas. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas jaringan pendukung inovasi menjadi sebuah upaya yang harus terus dilakukan agar pengelolaan kawasan wisata lebih optimal.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang Kabupaten Serang seperti lemahnya *political will* dan komitmen dari stakeholder, lemahnya kolaborasi sebagai pendorong kapasitas inovasi, inovasi masih bersifat *top down*, rendahnya dukungan politik dan anggaran dan masih minimnya jaringan pendukung inovasi dapat diatasi melalui pendekatan kapasitas inovasi pemerintah daerah yaitu kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi dan kapasitas jaringan pendukung inovasi.

Rekomendasi

Kapasitas inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata alam gunung pinang Kabupaten Serang harus memprioritaskan peningkatan kapasitas yang melalui program-program kerja yang berkelanjutan dan memberikan dampak manfaat positif kepada masyarakat. Selain itu diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan melalui prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari upaya tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

Alsos, G. A., Eide, D., & Madsen, E. L. (2014). Introduction: Innovation in tourism industries 1 . Introduction : innovation in tourism industries, (January). <https://doi.org/10.4337/9781782548416.0006>

Brandao, Filipa, C. C. and B. D. (2015). Tourism Innovation Networks: A Regional Approach Filipa Brandão 1*, Carlos Costa 2 and Dimitrios Buhalis 3 _____ 1, 1-48.

Gabris, Gerald T., Kimberly Nelson and Curtis H.Wood. 2009. *Managing For Innovation in Local Government: Three Core Strategic Factors*. The Radford University

Governmental and Nonprofit Assitency Centre

Gomezelj, D. (2015). Innovativeness in Tourism: Model Development. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 750-756. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00550-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00550-X)

Grindle, Merilee S. (Editor). 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development.

Hjalager, A. (2010). Progress in Tourism Management A review of innovation research in tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012>

Keban, Yermias T. 2000. *Good Governance" dan "Capacity Building" sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Naskah No.20 Team Leader Capacity Building for Local Government Bappenas

Kim, Seok Eun, Jung Wook Lee & Byong Seob Kim. 2007. *The Quality of Management and Government Innovation: An Empirical Study*. A paper for presentation at the 9th Public Management Research Conference, University of Arizona, October 25-27.

Lecture, S., Costa, T., & Lecture, S. (2011). Tourism innovation - a literature review complemented by case study research. In *International Conference on Tourism & Management Studies-Algarve* (Vol. I, pp. 23-33).

Lopes, R., & Kastenholz, E. (2014). Innovation , tourism and social networks. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 21(22), 2012-2015.

Najda-janoszka, M., & Kopera, S. (2014). Exploring barriers to innovation in tourism industry - the case of southern region of Poland. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 110, 190-201. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.862>

Osborne, Stephen P. & Kerry Brown. 2005.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Managing Change and Innovation in Public Service Organizations. New York: Routledge.

Kawasan Ekowisata Situturate Desa Situturate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang). *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 110-121.

Peters, M., & Pikkemaat, B. (2006). Innovation in Tourism. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, (April 2015). <https://doi.org/10.1300/J162v06n03>

Watson, Douglas J. 1997. *Innovative Government: Creative Approach to Local Problems*. London: Greenword Publishing Group.

Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 1-14.

Zach, F. J., & Hill, T. L. (2017). Network , knowledge and relationship impacts on innovation in tourism destinations. *Tourism Management*, 62, 196-207. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.001>

Sururi, A. (2018). Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Studi pada